

SINOPSIS

Untuk mewujudkan prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah melalui UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang bertekad untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, akuntabel, efisien melalui prinsip-prinsip *Good Governance*, yang melibatkan secara penuh peran masyarakat dalam proses pembangunan. Maka Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang mengimplementasikannya ke dalam wujud proses pembangunan partisipatif dalam penyusunan APBD tahun 2005. Maksudnya adalah dalam penyusunan APBD harus melibatkan peran serta masyarakat pada saat proses pengambilan keputusan yakni melalui Tahap Penjaringan Aspirasi Masyarakat dengan menggunakan Metode MUSRENBANG yang dilaksanakan secara *Bottom Up* (dari bawah) mulai dari Musrenbangdes/kel, Musrenbangkec, dan Musrenbangkab yang selanjutnya hasil usulan kegiatan / Musrenbang tersebut akan menjadi masukan dalam penentuan Strategi dan Prioritas Pembangunan APBD Tahun 2005 di Kabupaten Magelang.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan secara langsung, untuk mengadakan pengambilan data mengenai Proses Pembangunan Partisipatif dalam Penyusunan APBD Tahun 2005. Adapun unit analisis dilaksanakan pada 4 Kantor, diantaranya: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah, dan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Teknik analisa data yang digunakan adalah Analisa Deskriptif Kualitatif, karena proses penyederhanaan data yang mudah dibaca dan diinterpretasikan yakni melalui Teknik Observasi, Interview, dan Dokumentasi.

Adapun proses pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Magelang pada Tahun 2004 adalah sebagai berikut : Pemerintah Daerah membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya menjadi bahan masukan pada Musrenbangdes/kel, hasil kegiatan Musrenbangdes/kel berupa Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya menjadi bahan masukan pada Musrenbangkec, hasil kegiatan Musrenbangkec berupa Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan, yang selanjutnya akan menjadi bahan masukan pada Musrenbangkab diformat dalam bentuk penilaian yang selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penentuan Strategi dan Prioritas kegiatan APBD Tahun 2005 di Kabupaten Magelang.

Mengingat kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan Musrenbang Tahun 2004 adalah mengenai usulan kegiatan dari masyarakat yang masih bersifat keinginan pribadi bukan kebutuhan yang menjadi prioritas unggulan pembangunan masyarakat daerah secara menyeluruh maka, Pemerintah Daerah dalam hal ini Tim Fasailitator pada saat proses pelaksanaan Musrenbang baik dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan hingga Kabupaten harus lebih meningkatkan Metode Pendekatan Sosialisasi yang dapat berupa pemberian pengertian dan pemahaman bahwa usulan kegiatan harus merupakan prioritas unggulan pembangunan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi riil Masyarakat / Daerah Kabupaten Magelang sehingga hubungan antara Masyarakat dan Negara dapat berjalan secara harmonis dan berkesinambungan.